

# **ANALISIS PENGEMBANGAN *CIVIC SKILLS* PESERTA DIDIK OLEH GURU PPKn Di MTs AL – IKHLAS TANJUNG BINTANG LAMPUNG SELATAN**

***Oleh***

***(Cahaya Erizha Saputri, Hermi Yanzi, Obby Taufik Hidayat, Ana Mentari)***

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya guru PPKn dalam pengembangan *civic skills* peserta didik di MTs AL – Ikhlas Tanjung Bintang Lampung Selatan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penentuan informan atau subjek dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pengembangan *civic skills* peserta didik oleh guru PPKn di MTs AL – Ikhlas Tanjung Bintang Lampung Selatan dilakukan dengan upaya berdasarkan kompetensi-kompetensi guru yang dimilikinya. Kemampuan *hardskills* mencakup kompetensi profesional dan kompetensi pedagogik guru, sedangkan kemampuan *softskills* mencakup kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial guru. Kompetensi guru di MTs AL – Ikhlas Tanjung Bintang sudah memadai dalam mengajar dan menanamkan nilai – nilai religius untuk pengembangan *civic skills*. Keadaan sarana dan prasarana juga mendukung Guru PPKn dalam mengembangkan *civic skills* peserta didik, maka pengembangan *civic skills* peserta didik yang sesuai dengan pencapaian pembelajaran melalui pendidikan kewarganegaraan. Upaya pemberian tugas mengkorelasikan antara materi dengan ayat-ayat Al – Qur'an, implementasi gbelajar secara kelompok, mengajak tadarus sebelum belajar, serta diselingi dengan siraman rohani kepada peserta didik, dan memberikan motivasi, sehingga dari pembelajaran tersebut peserta didik secara aktif mengembangkan potensinya termasuk dengan keterampilan kewarganegaraan yang berkepribadian baik, berakhlak, cerdas dalam intelektualnya, serta religius sebagai bekal dalam kehidupan di masyarakat.

***Kata kunci : Guru PPKn, Kompetensi Guru, Pengembangan, Civic Skills***

**THE ANALYSIS OF CIVIC SKILLS DEVELOPMENT BY THE CIVIC  
EDUCATION TEACHER AT MTs AL – IKHLAS TANJUNG BINTANG  
LAMPUNG SELATAN IN ACADEMICS YEAR OF 2018/2019.**

***By:***

***(Cahaya Erizha Saputri, Hermi Yanzi, Obby Taufik Hidayat, Ana Mentari)***

***Abstract:***

The purpose of the research was to know the efforts of Civic Education teacher in the development of students civic skills at MTs Al – Ikhlas Tanjung Bintang Lampung Selatan. This research used qualitative descriptive methods. The determination of the informant or the subject in this research used a purposive sampling technique. The results showed that development of students civic skills by Civic Education teachers at MTs Al – Ikhlas Tanjung Bintang Lampung Selatan conducted with efforts based on teachers' competencies. Hard skills included professional competence and pedagogic competence of teachers, while soft skills included personality competence and social competence of teachers. The competency of teachers at MTs Al – Ikhlas Tanjung Bintang has been adequate in teaching and cultivating religious values for the development of civic skills. Facilities and infrastructure also support Civic Education teachers in developing students civic skills, then the development of students civic skills that fit the achievement of learning through Civic Education. Efforts to assign tasks correlate the material with verses of the Qur'an, the implementation of group learning, inviting tadarus before learning, and interspersed with a spiritual spelling to students, and provide motivation, so that from learning the students actively develop their potential including civic skills that are of good character, moral, intelligent in intellectual, and religious as provisions in life in society.

***Keywords:*** *Civic Education teacher, teacher competence, development, civic skills*

## PENDAHULUAN

Pendidikan sesungguhnya memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yakni dalam upaya menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Sejarah menunjukkan bahwa faktor yang paling menentukan keberhasilan suatu bangsa bukan kekayaan yang dimilikinya, melainkan kualitas sumber daya manusianya (Sudarsana, 2015). Maka diperlukan generasi muda yang memiliki kompetensi-kompetensi atau keterampilan yang khas untuk merespon kemajuan zaman. Hal ini diperlukan oleh peserta didik sebagai penerus bangsa untuk berpartisipasi dalam lingkungan baik nasional maupun internasional.

Pendidikan Kewarganegaraan yang bermutu adalah memberdayakan seseorang untuk mengidentifikasi atau memberi makna yang berarti pada sesuatu yang berwujud seperti bendera, lambang negara, lagu kebangsaan, monumen nasional, atau peristiwa-peristiwa politik dan kenegaraan. Berpartisipasi dalam kehidupan kewarganegaraan membantu warga negara untuk selalu menyesuaikan diri dengan peristiwa-peristiwa yang sedang aktual dalam pola jangka waktu yang lama. Dalam masyarakat yang otonom, warga negara adalah pembuat keputusan. Oleh karena itu, mereka perlu mengembangkan dan terus mengasah kemampuan mengevaluasi, mengambil, dan mempertahankan pendapat ketika mereka diminta untuk menilai isu – isu yang ada dalam agenda publik.

Pengembangan dimensi *civic skills* dilandasi oleh *civic knowledge*. Dimensi ini dikembangkan dengan tujuan untuk memberikan keterampilan yang diperlukan peserta didik untuk dapat

berperan serta secara efektif dalam masyarakat dan menyadarkan peserta didik tentang pentingnya peran aktif warga negara. Namun kondisi sejumlah peserta didik di Indonesia belum memiliki keahlian atau kompetensi untuk menjadi warga negara global yang baik dan berpartisipasi.

Pembinaan terhadap generasi muda menjadi warganegara yang baik menjadi perhatian utama. Tidak ada tugas yang lebih penting dari pengembangan warganegara yang bertanggung jawab, efektif, dan terdidik (Budimansyah, 2010). Dari hasil tes dan evaluasi PISA (*Programme for International Students Assessment*) 2015 performa peserta didik Indonesia masih tergolong rendah, berturut-turut rata-rata skor pencapaian peserta didik Indonesia untuk sains, membaca, dan matematika berada di peringkat 62, 61, dan 63 dari 69 negara yang di evaluasi (Iswadi, 2016). Secara umum dapat dipahami bahwa rendahnya mutu sumber daya manusia bangsa Indonesia saat ini adalah akibat rendahnya mutu pendidikan.

Dalam praktik, Pendidikan Kewarganegaraan dipahami sebagai mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warganegara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945 (Budimansyah, 2010). Keberhasilan pendidikan kewarganegaraan juga bergantung pada peran guru dalam mendidik. Maka sebenarnya guru memiliki peran yang sangat penting dalam membantu peserta didik sebagaimana yang dicita-citakan.

MTs Al – Ikhlas Tanjung Bintang Lampung Selatan merupakan sekolah

menengah pertama berbasis islam yang ada di Kecamatan Tanjung Bintang Lampung Selatan. Guru PPKn di sekolah ini melakukan tadarus atau mengaji bersama peserta didik sebelum memulai pelajaran, biasanya di sekolah lain hanya melakukan baca doa saja sebelum memulai pelajaran. Selanjutnya guru PPKn, mengadakan *games* bersama peserta didik dengan harapan dapat mengasah keterampilan peserta didik dalam berpikir atau juga konsentrasi peserta didik serta dapat mengembangkan partisipasi peserta didik, tak jarang guru juga mengajak peserta didik belajar di luar kelas guna menghindarkan rasa bosan dan suntuk peserta didik karena pembelajaran yang monoton.

Keunikan dari penelitian ini adalah cara guru PPKn mengembangkan *civic skills* peserta didik melalui mata pelajaran PPKn yang dipadukan dengan nilai-nilai belajar yang islami dengan cara memberikan tugas mandiri untuk mencari hubungan korelasinya antara materi dengan isi kandungan Al-Qur'an. Hal ini dimaksudkan agar peserta didik dalam pengembangan *civic skills* memiliki keterampilan kewarganegaraan yang religius berdasarkan ajaran Al – Qur'an sehingga peserta didik dapat menerapkan keterampilan yang diserap melalui pengetahuan yang selaras dengan iman dan taqwa. Hal tersebut di pandang sebagai salah satu cara untuk meningkatkan keterampilan peserta didik dan dapat diimplementasikan dalam kehidupan peserta didik sehari-hari.

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan fokus masalah yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimanakah

upaya guru PPKn dalam pengembangan *civic skills* peserta didik di MTs Al – Ikhlas Tanjung Bintang Lampung Selatan Tahun Pelajaran 2018/2019?

### **Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah dan fokus masalah maka tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis model pengembangan *civic skills* peserta didik oleh guru PPKn di MTs Al-Ikhlas Tanjung Bintang Lampung Selatan.
2. Untuk mengetahui upaya guru PPKn dalam peningkatan keterampilan intelektual dan partisipasi peserta didik di MTs Al – Ikhlas Tanjung Bintang Lampung Selatan.

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **1. Guru**

Pada hakikatnya guru menempati tempat yang terhormat dalam masyarakat. Karena kewibawaannya yang menyebabkan guru dihormati. Masyarakat percaya bahwa dengan adanya guru, maka dapat mendidik dan membentuk kepribadian anak didik mereka dengan baik. Menurut UU RI No 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen Pasal 1 (1) “ Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik dalam pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah”. Dalam hal ini, guru dianggap sebagai pendidik yang profesional karena guru telah menerima sekaligus memikul beban dari orang tua untuk ikut mendidik anak dalam lembaga pendidikan sekolah.

Guru dapat diibaratkan sebagai pembimbing perjalanan, yang berdasarkan pengetahuan dan pengalaman bertanggung jawab atas kelancaran perjalanan peserta didik dalam proses pembelajaran. Orang yang disebut guru adalah orang yang memiliki kemampuan dalam merancang program pembelajaran, serta mampu menata dan mengelola kelas agar peserta didik dapat belajar dan pada akhirnya mendapat tingkat kedewasaan sebagai tujuan akhir dari proses pendidikan (Suprihatiningrum 2016:24). Dilain pihak, guru sebagai pendidik profesional mempunyai citra yang baik di masyarakat apabila dapat menunjukkan kepada masyarakat bahwa ia layak menjadi panutan atau teladan masyarakat sekelilingnya. Hal ini berhubungan dengan bagaimana pola tingkah laku guru dalam memahami, menghayati, serta mengamalkan sikap kemampuan dan profesionalitasnya.

## 2. Konsep Pendidikan

### Kewarganegaraan di Indonesia

Pendidikan Kewarganegaraan (*Civic Education*) atau *Civics* memiliki pengertian dan istilah. *Civics* selalu didefinisikan sebagai sebuah studi tentang pemerintahan dan kewarganegaraan yang terkait dengan kewajiban, hak, dan hak-hak istimewa warga negara. Sehubungan dengan *Civics*, maka Pendidikan Kewarganegaraan adalah pendidikan demokrasi yang bertujuan untuk mempersiapkan warga negara masyarakat berpikir dan bertindak demokratis, melalui aktifitas menanamkan kesadaran kepada generasi baru bahwa demokrasi adalah bentuk kehidupan

masyarakat yang paling menjamin hak-hak warga masyarakat.

Pendidikan Kewarganegaraan adalah pendidikan untuk menjadikan warga negara yang demokratis dengan kajian dan pembahasan yang mencakup pengetahuan tentang kewarganegaraan dalam kehidupan masyarakat menuju masyarakat madani. Pendidikan kewarganegaraan memiliki standar kompetensi dan kompetensi dasar. Standar kompetensi adalah kualifikasi atau ukuran kemampuan kecakapan seseorang yang mencakup seperangkat pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Maka standar kompetensi Pendidikan Kewarganegaraan (*Civic Education*) adalah menjadi warga negara yang cerdas dan berkeadaban (*Intelligent and Civilized Citizens*). *Civic Intelligence* dalam rumusan *Massachusetts Institute of Technology Encyclopedia of Cognitive Sciences* adalah kemampuan seseorang untuk menyesuaikan diri, memilih, dan mengembangkan lingkungannya. Intelegensi berkenaan dengan tiga kemampuan individu berinteraksi dengan lingkungannya, yaitu kemampuan adaptasi, konstruktif, dan selektif. Dengan demikian *civic intelligence* dirumuskan sebagai kemampuan seseorang untuk mengetahui dan menghayati hak dan kewajibannya sebagai warga negara masyarakat, serta mentransformasikan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari (Ubaedillah dan Rozak, 2012:16).

Konsep pendidikan kewarganegaraan yang seperti inilah

diharapkan mampu merespons kebutuhan masyarakat Indonesia abad ke-21. Konsep pendidikan kewarganegaraan tidak lepas dari unsur-unsur yang harus dikuasai oleh setiap warga negara: pengetahuan, keterampilan, nilai, dan komitmen yang secara ideal harus dimiliki setiap warga negara.

Kompetensi dasar dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan yang akan ditransformasikan kepada peserta didik terdiri dari tiga jenis (Ubaedillah dan Rozak, 2012:17-18) yaitu : Pertama, kompetensi pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*) yaitu kemampuan dan kecakapan yang terkait dengan materi inti pendidikan kewarganegaraan, yaitu demokrasi, hak asasi manusia, dan masyarakat madani. Kedua, kompetensi sikap kewarganegaraan (*civic dispositions*), yaitu kemampuan dan kecakapan terkait dengan kesadaran dan komitmen warga negara antara lain komitmen akan kesadaran gender, toleransi, kemajemukan, dan komitmen untuk peduli serta terlibat dalam penyelesaian persoalan-persoalan warga negara yang terkait dengan pelanggaran HAM. Ketiga, kompetensi keterampilan kewarganegaraan (*civic skills*), yaitu kemampuan dan kecakapan mengartikulasikan keterampilan kewarganegaraan seperti kemampuan berpartisipasi dalam proses pembuatan kebijakan publik, kemampuan melakukan kontrol terhadap penyelenggara negara dan pemerintahan.

### **3. Civic Skills (Keterampilan Kewarganegaraan)**

Pendidikan Kewarganegaraan (*Civic Education*) sudah mulai mengarah

pada tiga komponen PKN paradigma baru, seperti yang diajukan oleh *Centre for Civic Education* pada tahun 1999 dalam *National Standard for Civic and Government*. Ketiga komponen tersebut, yaitu *civic knowledge* (pengetahuan kewarganegaraan), *civic skills* (keterampilan kewarganegaraan) dan *civic disposition* (karakter kewarganegaraan) (Branson 1999). Komponen esensial kedua *Civic Education* tersebut adalah keterampilan kewarganegaraan (*civic skills*). Keterampilan kewarganegaraan merupakan suatu kemampuan dalam mengimplementasikan pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*) yang telah dikuasai oleh seorang warga negara.

### **4. Intellectual Skills (Keterampilan Intelektual)**

Keterampilan intelektual menuntut untuk pemikiran kritis dalam isu-isu politik, baik itu latar belakang atau sejarahnya maupun keterkaitan perkembangan zaman di dalam masyarakat dan pemerintahan (Branson, 1999:8). Berdasarkan pendapat Branson diatas, maka keterampilan intelektual dalam bidang kewarganegaraan dan pemerintahan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. mereka harus memahami tentang isu-isu politik, sejarahnya, dan relevansi di masa kini merupakan keterampilan berpikir kritis.

*The National Standards for Civics and Government and the Civics Framework for the 1998 National Assessment of Educational Progress (NAEP)* membuat kategori mengenai keterampilan intelektual yaitu keterampilan mengidentifikasi dan mendeskripsikan, menjelaskan

dan menganalisis, dan mengevaluasi, mengambil, serta mempertahankan posisi atau pendapat pada isu-isu publik. Keterampilan intelektual yang penting bagi terbentuknya warga negara yang berwawasan luas, efektif dan bertanggung jawab, antara lain keterampilan berpikir kritis.

#### 5. **Participatory Skills (Keterampilan Partisipasi)**

*“In addition to the acquisition of knowledge and intellectual skills, education for citizenship in a democratic society must focus on skills that are required for informed, effective, and responsible participation in the political process and in civil society.”* (Branson, 1999:9). Berdasarkan pendapat Branson diatas, keterampilan kewarganegaraan setelah keterampilan intelektual adalah keterampilan partisipasi dimana keterampilan tersebut dibutuhkan untuk berpartisipasi yang bertanggung jawab dalam proses politik serta dalam masyarakat madani. Selain itu, dalam keterampilan partisipasi juga terdapat beberapa kategori, yaitu interaksi (*interacting*), memonitoring (*monitoring*), dan mempengaruhi (*influencing*). Sedangkan Winataputra menyatakan keterampilan partisipatif dimaksudkan keterampilan-keterampilan yang diperlukan bagi partisipasi warga negara yang berwawasan luas, efektif dan bertanggung jawab dalam proses politik dan dalam masyarakat sipil seperti keterampilan berinteraksi, memantau, dan mempengaruhi.

Keterampilan partisipasi dilihat dari bagaimana seorang warga negara yang berpartisipasi berdasarkan komponen berinteraksi, memantau/memonitoring, dan mempengaruhi. Berinteraksi berarti adanya komunikasi dan kerja sama antar warga negara atau adanya responsif terhadap warga negara. Berinteraksi disini berarti bertanya, menjawab, dan juga berunding secara santun untuk membangun koalisi dan mengelola konflik dengan cara yang adil dan damai. Memonitoring berarti fungsi pengawasan warga negara. Memonitoring mengacu pada keterampilan yang dibutuhkan warga negara untuk terlibat dalam penanganan masalah politik dan pemerintahan. Selanjutnya mempengaruhi berarti cara warga negara untuk ikut serta dalam mempengaruhi dan mengambil kebijakan melalui kerja sama dengan pihak lain dan mampu memberikan penjelasan terhadap suatu masalah dalam pembuatan kebijakan.

#### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan menggunakan analisis kualitatif melalui analisis yang menggunakan pendekatan ilmiah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Sampel disebut dengan informan yaitu orang yang merupakan sumber informasi. Penentuan subyek di penelitian ini, peneliti menggunakan *purposive dan snowball* yaitu teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada *generalisasi* (Sugiyono, 2017:15).

Berdasarkan pertimbangan, maka informan dalam penelitian ini adalah:

1. Kepala Sekolah MTs Al – Ikhlas Tanjung Bintang Lampung Selatan
2. Guru PPKn MTs Al – Ikhlas Tanjung Bintang Lampung Selatan
3. Peserta Didik MTs Al – Ikhlas Tanjung Bintang Lampung Selatan

Data yang digunakan dalam penelitian kualitatif ini adalah data primer dan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber. Data utama atau primer merupakan data Kepala Madrasah Tsanawiyah Al – Ikhlas Tanjung Bintang dan Guru PPKn. Data utama dalam penelitian ini adalah data peserta didik dan guru PPKn MTs Al – Ikhlas Tanjung Bintang. Data sekunder di kumpulkan peneliti sebagai penunjang dari data primer. Data-data sekunder didapatkan peneliti melalui dokumentasi-dokumentasi saat observasi di MTs Al – Ikhlas Tanjung Bintang. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah kegiatan pembelajaran di kelas 7 dan 8.

Penelitian ini menggunakan peneliti sendiri sebagai instrumen penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan informasi tentang data yang diperlukan dengan cara bertanya, meminta, mendengar, dan mengambil. Peneliti mengumpulkan sendiri data-data tersebut dari berbagai sumber yang berkaitan dengan penelitiannya.

Teknik pengumpulan data dilakukan cara observasi kelapangan, wawancara dengan informan, dan dokumentasi hasil penelitian untuk mendapatkan bahan dan catatan yang sesuai dengan teori penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Dimensi Guru PPKn di MTs Al – Ikhlas Tanjung Bintang

Dalam praktik, Pendidikan Kewarganegaraan dipahami sebagai mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warganegara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945. Di MTs Al – Ikhlas Tanjung Bintang terdapat dua guru yang mengajar mata pelajaran PPKn. Berdasarkan hasil penelitian, guru PPKn menjadi teladan bagi peserta didik dalam pengembangan keterampilan kewarganegaraan yang mereka miliki. Dalam pengembangan tersebut terdapat beberapa upaya guru PPKn berdasarkan kompetensi atau kemampuan yang dimiliki oleh masing-masing guru PPKn di MTs Al – Ikhlas Tanjung Bintang. Kompetensi tersebut terbagi dalam dua kemampuan yaitu *hard skills* dan *soft skills* yang dimiliki oleh kedua guru PPKn di MTs Al – Ikhlas Tanjung Bintang.

#### a. *Hard skills* Guru PPKn

Salah satu kemampuan guru yang harus dimiliki adalah *hard skills*. *hard skills* merupakan penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan teknis yang berhubungan dengan bidang ilmunya. Dalam penelitian ini peneliti membagi kompetensi profesional dan kompetensi pedagogik guru sebagai *hard skills* guru PPKn. Dimana kompetensi profesional sebagai bentuk kemampuan guru dalam menjalankan profesi keguruannya

sehingga guru tidak hanya mengetahui materi yang diajarkannya tapi memahami secara luas dan mendalam serta ditunjukkan melalui kinerjanya. Sedangkan kompetensi pedagogik sebagai bentuk kemampuan guru PPKn dalam memahami karakteristik peserta didik melalui pengelolaan kelas atau dengan cara merancang, melaksanakan, dan evaluasi pembelajaran. Dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas merupakan proses belajar yang mencakup baik indera penglihatan maupun indera pendengaran. Dimana dalam proses ini selain menyampaikan materi guru juga dituntut untuk mengintegrasikan nilai-nilai berbasis keterampilan peserta didik yang akan memiliki kemampuan dimana tidak hanya kognitif saja, namun juga memiliki kemampuan dalam aspek psikomotorik dan afektif.

Sebagaimana diperkuat oleh Musfah (2011:31) yang menyatakan bahwa pemahaman tentang peserta didik berarti guru harus memahami semua peserta didik dalam seluruh konteks pendidikan itu unik. Perancangan pembelajaran berarti guru mengetahui apa yang akan diajarkannya pada peserta didik dan menyiapkan metode serta media pembelajaran setiap akan mengajar. Evaluasi hasil belajar berarti guru harus kreatif menggunakan penilaian dalam pengajaran. Pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya berarti pendidik harus memiliki kualifikasi dan kompetensi sebagai agen pembelajaran atau *learning agent*.

Hasil observasi menunjukkan upaya guru PPKn dalam pembelajaran menggunakan pendekatan berpikir kritis dengan model pembelajaran kontekstual. Guru bersama peserta didik saling mendiskusikan terkait materi yang sebelumnya telah dijelaskan, kemudian guru mencoba mengaitkan dengan kehidupan peserta didik yang memberikan cerminan dalam keterampilan partisipasi kepada peserta didik untuk saling menghormati dengan keunikan masing-masing.

Hal ini didukung dengan hasil penelitian Komalasari (2011:54) pembelajaran kontekstual dalam pendidikan kewarganegaraan berpengaruh signifikan terhadap kompetensi kewarganegaraan peserta didik karena dengan menerapkan teori belajar konstruktivistik yang bersifat alamiah bagi peserta didik, dimana kompetensi kewarganegaraan dibangun dalam diri seorang individu melalui proses interaksi yang berkesinambungan antara pengetahuan yang telah dimiliki peserta didik dengan objek, fenomena, pengalaman dan lingkungan.

Berbekal dari pengalaman mengajar dan mengikuti pelatihan-pelatihan guru PPKn juga dituntut untuk kreatif mungkin mengembangkan berbagai model pembelajaran yang ada. Pemilihan metode dan media belajar yang dilakukan oleh guru PPKn dalam kelas disesuaikan dengan kondisi peserta didik dan materi yang akan disampaikan.

Keadaan sarana dan prasarana juga mempengaruhi guru PPKn dalam memilih media belajar. Di MTs Al –

Ikhlas Tanjung Bintang terdapat sarana dan prasarana yang cukup memadai dalam mendukung kegiatan belajar mengajar. Tidak hanya terpaku dalam buku pelajaran, media belajar yang digunakan guru PPKn juga berupa gambar, *slide power point*, dan penggunaan internet di perpustakaan yang dapat digunakan untuk mencari materi atau informasi pada setiap pembelajaran sesuai dengan materi yang akan disampaikan. Keadaan peserta didik dengan sifat yang berbeda-beda juga menjadi salah satu perhatian guru PPKn dalam mendidik. Guru tentunya memiliki cara masing-masing dalam penyampaian materi, melalui model, pendekatan dan media pembelajaran yang mereka pilih.

Berdasarkan hasil observasi, peserta didik sesekali merasa jenuh saat pembelajaran berlangsung di dalam kelas, meskipun sudah berbentuk kelompok, masih ada peserta didik yang merasa bosan ketika mereka belajar hanya didalam kelas. Hal tersebut berpengaruh terhadap kemampuan peserta didik dalam berpikir serta partisipasi mereka dalam kegiatan belajar. Salah satu upaya guru PPKn di MTs Al – Ikhlas Tanjung Bintang adalah dengan mengajak peserta didik untuk belajar diluar kelas, seperti misalnya belajar di perpustakaan ditambah dengan *hotspot area* disekitar perpustakaan.

Berdasarkan wawancara dengan salah satu guru PPKn mengatakan bahwa penggunaan model belajar permainan pernah diterapkan sesuai dengan materi yang akan disampaikan. Dengan menggunakan model pembelajaran tersebut

antusias peserta didik dalam mengikuti pembelajaran lebih meningkat. Dalam hal ini, ketertarikan peserta didik dalam mengikuti pembelajaran akan memudahkan pengembangan keterampilan keterampilan kewarganegaraan oleh guru PPKn. Selain itu, salah satu guru PPKn juga mengatakan bahwa pembelajaran PPKn juga seringkali menggunakan berita-berita yang sedang hangat dibicarakan di berbagai media, sehingga guru PPKn juga menceritakan kejadian tersebut dan mengaitkan dengan kehidupan peserta didik.

Sebagaimana diperkuat oleh Suryani (2012:75) yang menyatakan Pembelajaran kontekstual atau *Contextual Teaching and Learning* (CTL) adalah konsep pembelajaran yang mendorong guru untuk menghubungkan antara materi yang diajarkan dan situasi dunia nyata peserta didik. Kemampuan guru tersebut menarik antusias peserta didik karena tidak terpaku pada materi dan penyampaian dengan bercerita menjadi lebih mudah diterima bagi peserta didik. Sehingga peserta didik dapat mengetahui contoh penerapan dari materi yang didapat, dan secara umum metode pembelajaran ini sebagai implementasi pembelajaran PPKn dalam pengembangan keterampilan kewarganegaraan peserta didik sudah cukup efektif untuk diterapkan pada peserta didik.

Dalam kurikulum Sekolah Menengah Pertama pada umumnya sama dengan kurikulum di Madrasah Tsanawiyah. Hanya saja muatan pelajaran agama di MTs lebih banyak dibandingkan sekolah

pada umumnya. Berdasarkan wawancara dengan guru PPKn, mengatakan bahwa pembelajaran PPKn di MTs juga bertujuan untuk menjadikan peserta didik sebagai warga negara yang bukan hanya cerdas, terampil dan berkarakter, melainkan sebagai warga negara yang memiliki bekal keagamaan atau menjadi warga negara yang taat pada agama berdasarkan iman dan taqwa. Guru PPKn juga menugaskan kepada peserta didik untuk mengaitkan materi yang terdapat di buku atau materi yang sedang diajarkan dengan isi kandungan ayat-ayat Al – Qur'an. Sehingga peserta didik memiliki keterampilan kewarganegaraan yang juga religius.

Hasil observasi menunjukkan, metode pembelajaran yang digunakan selama proses pembelajaran yang dilaksanakan dalam kelas adalah berbasis masalah yang bervariasi ceramah, tanya jawab, diskusi, dan penugasan. Oleh karena itu strategi pembelajaran yang dilakukan guru PPKn MTs Al – Ikhlas Tanjung Bintang dapat dikategorikan pembelajaran aktif yang berpusat pada peserta didik. Ditambah dengan strategi khusus seperti penugasan mandiri peserta didik untuk mengaitkan materi kedalam kandungan ayat-ayat Al – Qur'an.

Jadi *hard skills* guru PPKn di MTs Al – Ikhlas Tanjung Bintang berdasarkan kompetensi profesional dan pedagogiknya dalam upaya pengembangan *civic skills* peserta didik, guru sudah memiliki kompetensi tersebut. Guru PPKn mampu menunjukkan profesi keguruannya dengan dasar guru

adalah pendidik dan harus menampilkan kinerja nya sebagai seorang guru yang memiliki pemahaman secara luas dan mendalam ketika menyampaikan materi. Kemudian dalam kompetensi pedagogik, guru PPKn di MTs Al – Ikhlas dalam upaya pengembangan *civic skills* peserta didik sudah mampu mengelola pembelajaran melalui model, metode, strategi, media dan pendekatan yang guru PPKn pilih dalam setiap pembelajaran.

#### **b. Soft Skills Guru PPKn**

Selain berdasarkan kemampuan guru dalam memilih model, metode, strategi, dan media pembelajaran, hal lain yang berpengaruh dalam upaya guru mengembangkan keterampilan kewarganegaraan peserta didik adalah dengan kemampuan dalam diri guru PPKn tersebut atau disebut dengan *soft skills*. *Soft skills* adalah keterampilan seseorang dalam berhubungan dengan orang lain (*interpersonal skills*) dan keterampilan mengatur dirinya sendiri (*intrapersonal skills*) yang mampu mengembangkan unjuk kerja secara maksimal. Dalam hal ini peneliti membagi kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial guru sebagai *soft skills*.

Kemampuan tersebut terdiri dari cara guru PPKn yang berkomunikasi dengan peserta didik, kemampuan guru PPKn mengendalikan emosionalnya, juga kemampuan guru PPKn sebagai pemimpin kelas sehingga menjadikan guru PPKn sebagai teladan bagi peserta didik. Guru berperan sebagai fasilitator dan motivator agar peserta didik dapat melakukan proses belajar

dengan baik. Sebagai fasilitator guru memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada peserta didik untuk mengembangkan kemampuan dan keterampilan yang dimiliki, dan sebagai motivator guru senantiasa memotivasi peserta didik agar terus meningkatkan kemampuannya dalam belajar. Hasil observasi menunjukkan bahwa guru PPKn mampu menciptakan komunikasi yang interaktif ketika pelajaran berlangsung. Peserta didik diberikan umpanan terlebih dahulu yang akan memacu peserta didik untuk bertanya kemudian guru PPKn menjawab pertanyaan tersebut atau sebaliknya.

Kemampuan berkomunikasi guru sangatlah penting karena dengan komunikasi yang baik maka pesan-pesan yang disampaikan dapat diterima dengan baik oleh peserta didik dan apa yang menjadi tujuan akan tercapai. Kemampuan komunikasi guru PPKn di MTs Al – Ikhlas Tanjung Bintang dengan peserta didiknya secara jelas terlihat sebagaimana kemampuan dalam membangun relasi secara efektif. Keefektifan tersebut sesuai dengan bentuk kecakapan yang diperkuat oleh Jaenuri (2017:130) yaitu kecakapan memberikan motivasi, bekerjasama, memimpin, kharismatik, dan melakukan mediasi.

Guru PPKn cenderung lebih sabar ketika berhadapan dengan puluhan peserta didik dengan sifat yang berbeda-beda. Guru PPKn di MTs Al – Ikhlas Tanjung Bintang mampu mengendalikan emosionalnya ketika menghadapi peserta didik yang tergolong sulit diatur dengan cara menegur peserta didik tersebut,

namun tetap dalam tutur kata yang baik, mencerminkan kepribadian yang baik, bersikap bijak serta arif, bersikap dewasa dan berwibawa serta mempunyai akhlak yang mulia sebagai cerminan dari kepribadiannya.

Jadi *soft skills* berdasarkan kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial guru PPKn di MTs Al – Ikhlas Tanjung Bintang dalam upaya pengembangan *civic skills* peserta didik, guru sudah menguasai dan memiliki kompetensi tersebut. Hal ini tercermin dengan kemampuan guru ketika berkomunikasi, memotivasi secara berkelanjutan, menjadi pemimpin di kelas, yang mendorong peserta didik untuk aktif dan berpartisipasi dalam kegiatan belajar dikelas. Secara langsung ketika guru PPKn menjadi teladan dengan segala bentuk kepribadiannya yang baik maka peserta didik mencontoh hal tersebut. Melalui pendidikan kewarganegaraan yang diajarkan oleh guru PPKn di MTs Al – Ikhlas Tanjung Bintang yang mencerminkan kompetensi kepribadian baik, keterampilan berkomunikasi yang interaktif, dan memotivasi peserta didik maka peserta didik megaktualisasikan potensi-potensi yang ada di dalam dirinya termasuk dalam keterampilan kewarganegaraan sehingga terdapat perkembangan yang positif dalam kepribadian dan keterampilan peserta didik.

## **2. Dimensi Pengembangan Civic Skills Peserta Didik**

Pendidikan Kewarganegaraan bertujuan untuk membentuk warga negara yang baik (*good citizens*). Warga negara yang baik adalah

warga negara yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang setia kepada bangsa dan negara Indonesia. Manusia sebagai warga negara pada dasarnya tidak begitu saja serta merta menjadi seorang negarawan atau mereka yang tampil sebagai pemimpin di negaranya, melainkan mereka terlebih dahulu melalui sekolah sebagai pendidikan yang akan menjadikan mereka tahu akan ilmu pengetahuan dan sekaligus menjadi pembuat keputusan dan menyelesaikan permasalahan.

Pengembangan dimensi *civic skills* dilandasi oleh *civic knowledge*. Dimensi ini dikembangkan dengan tujuan untuk memberikan keterampilan yang diperlukan peserta didik untuk dapat berperanserta secara efektif dalam masyarakat dan menyadarkan peserta didik tentang pentingnya peran aktif warga negara.

**a. Intellectual Skills Peserta Didik**

Dalam proses pengembangan keterampilan kewarganegaraan di MTs Al – Ikhlas Tanjung Bintang melalui peran guru PPKn dalam pembelajaran diharapkan nantinya terbentuk kecakapan atau keterampilan yang diharapkan sebagai dasar peserta didik berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Pengembangan keterampilan kewarganegaraan peserta didik di madrasah ini juga dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Adapun faktor lingkungan di madrasah ini adalah sekolah berbasis islam, oleh karena itu segala bentuk pengetahuan, keterampilan, dan karakter peserta didik berdasarkan nilai-nilai keislaman yang menjadikan peserta didik sebagai warga negara yang bertaqwa sesuai ajaran agama islam.

Bedasarkan hasil wawancara peserta didik di MTs Al – Ikhlas Tanjung Bintang, peserta didik di madrasah tersebut sudah mampu mengikuti atau mengetahui informasi terkait dengan permasalahan-permasalahan sekitar mereka seperti yang sedang hangat dibicarakan yaitu PEMILU 2019. Dalam penyampaian informasi tersebut, peserta didik mampu menganalisis, dan menjelaskan serta berpendapat terkait berita tersebut.

Dengan diperkuat oleh teori Branson (1999) mengenai keterampilan partisipasi yaitu keterampilan tersebut dibutuhkan untuk berpartisipasi yang bertanggung jawab dalam proses politik serta dalam masyarakat madani. Selain itu, dalam keterampilan partisipasi juga terdapt beberapa kategori, yaitu interaksi (*interacting*), memonitoring (*monitoring*), dan mempengaruhi (*influencing*). Hal ini menjadi salah satu bentuk kepedulian peserta didik terhadap suatu masalah yang terajadi disekitar mereka, meskipun ada juga peserta didik yang acuh terhadap berita tersebut.

**b. Participatory Skills Peserta Didik**

Dalam pengembangan keterampilan intelektual dan partisipasi peserta didik dikembangkan oleh upaya guru PPKn melalui kegiatan pembelajaran. Berdasarkan hasil observasi, guru PPKn menggunakan model belajar kelompok dalam pembelajaran, hal tersebut menjadikan peserta didik MTs Al – Ikhlas untuk saling bekerja sama atau kolaborasi dalam memecahkan suatu masalah yang disajikan oleh guru PPKn. Hal ini menjadikan peserta didik turut berpartisipasi

aktif dalam pembelajaran karena dalam setiap kelompok peserta didik memiliki tugas masing-masing dalam pemecahan suatu masalah. Sehingga peserta didik akan belajar memecahkan masalah, mengambil keputusan, menggunakan pemikirannya untuk menyelesaikan masalah yang ada. Diperkuat oleh pendapat Zubaidah (2016:4) yang menyatakan kolaborasi dalam proses pembelajaran merupakan suatu bentuk kerja sama dengan satu sama lain dengan saling membantu dan melengkapi.

Peserta didik di MTs Al – Ikhlas Tanjung Bintang juga diberikan kesempatan untuk menggunakan media belajar seperti internet yang tersedia di perpustakaan jika materi tersebut membutuhkan sumber lain selain berpedoman pada buku. Dalam hal ini peserta didik secara tidak langsung diajarkan untuk dapat menggunakan pemakaian media internet dalam memilih berita karena tetap dalam pengawasan guru. Selain media internet, guru PPKn juga menggunakan media gambar dan *slide power point* dalam pembelajaran. Hanya saja, dalam penggunaan *slide power point* juga terbatas karena jumlah sarana dan prasarana untuk penggunaan *power point* terbatas. Penggunaan media belajar yang bervariasi tersebut merupakan upaya guru PPKn dalam mengembangkan keterampilan peserta didik baik itu intelektual nya dan juga partisipasi mereka.

Hasil observasi di kelas VII A dengan bahasan materi “Daerah Dalam Kerangka NKRI” yang menggunakan media belajar berbentuk gambar-gambar daerah yang ingin memisahkan diri dari

NKRI, peserta didik mampu menganalisis dan berpendapat sesuai dengan pengetahuan mereka sebelumnya. Keterampilan berpikir kritis peserta didik terlihat ketika dalam sesi tanya jawab antar peserta didik. Dalam hal ini peserta didik berinteraksi secara interaktif pula dengan guru PPKn dalam pembahasan materi atau mengulas ulang materi, karena ketika pengulasan masih ada peserta didik yang bertanya dengan guru PPKn terkait materi tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian, guru PPKn MTs Al – Ikhlas Tanjung Bintang dalam menilai keberhasilan perkembangan *civic skills* peserta didik bukanlah sesuatu yang harus diukur namun ditargetkan. Karena berdasarkan lingkungan madrasah yang berbasis keislaman ini, peserta didik senantiasa diajarkan berperilaku sesuai dengan ajaran agama Islam. Untuk melihat perkembangan keterampilan peserta didik sudah terbentuk atau belum merupakan proses yang panjang dan membutuhkan waktu yang lama. Oleh karena itu, yang dilihat adalah prosesnya bukan pencapaian akhirnya.

### **Keunikan Penelitian**

Setelah dilakukan penelitian, penulis menemukan beberapa keunikan dalam penelitian berdasarkan fakta yang dijumpai dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut :

1. Adanya pendampingan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Madrasah sebagai suatu bentuk dukungan terhadap pengembangan keterampilan peserta didik oleh guru PPKn di MTs Al – Ikhlas Tanjung Bintang.

2. Dalam upaya mengembangkan keterampilan kewarganegaraan guru PPKn di MTs Al – Ikhlas Tanjung Bintang menyisipkan nilai-nilai keislaman kepada peserta didik melalui mengaitkan materi dengan isi kandungan ayat Al – Qur'an guna menjadikan peserta didik yang memiliki bekal di masyarakat sebagai warga negara yang cerdas, terampil, berkarakter namun juga religius dengan konteks keagamaan.
3. Guru PPKn di MTs Al – Ikhlas Tanjung Bintang menjadi teladan bagi peserta didik karena kompetensi kepribadian guru PPKn yang baik dan sebagai contoh peserta didik baik dalam berperilaku maupun berinteraksi.
4. Peserta didik mampu mengikuti berita atau isu-isu yang sedang terjadi di lingkungan sekitar peserta didik.
5. Terdapat Program Wiyata Mandala 7K Madrasah untuk seluruh warga madrasah dengan lingkungan pendidikan dan pembelajaran yang islami yaitu Ketaqwaan, Keamanan, Ketertiban, Kebersihan, Keindahan, Keridangan, Kekeluargaan.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diuraikan mengenai analisis tentang pengembangan *civic skills* peserta didik oleh guru PPKn di MTs Al – Ikhlas Tanjung Bintang Lampung Selatan tahun pelajaran 2018/2019 dapat disimpulkan bahwa terdapat upaya guru PPKn dalam mengembangkan *civic skills* peserta didik di MTs Al – Ikhlas Tanjung Bintang ini berdasarkan kemampuan guru yaitu *hard skills* yang terdiri dari kompetensi profesional dan kompetensi

pedagogik guru, serta *soft skills* yang terdiri dari kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial guru.

Guru PPKn di MTs Al – Ikhlas Tanjung Bintang sudah memiliki kompetensi yang sesuai dalam pengembangan *civic skills* peserta didik dengan upaya nya dalam memilih dan mengelola pembelajaran dikelas dengan memahami karakteristik peserta didiknya. Kemudian melalui upaya pemberian tugas mengkorelasikan antara materi dengan ayat-ayat Al – Qur'an, mengajak tadarus sebelum belajar, serta diselingi dengan siraman rohani kepada peserta didik ketika belajar, sehingga dari pembelajaran tersebut peserta didik secara aktif mengembangkan potensinya termasuk dengan keterampilan kewarganegaraan yang berkepribadian baik, berakhlak, cerdas dalam intelektualnya, serta religius sebagai bekal dalam kehidupan di masyarakat.

Selain itu upaya guru PPKn dalam mengembangkan *civic skills* peserta didik adalah dengan memberikan motivasi, dorongan, serta menjadi tauladan atau *role model* bagi peserta didik. Dengan motivasi yang diberikan, timbul rasa percaya diri peserta didik untuk mengungkapkan atau menyalurkan pendapatnya bahkan memperthankan pendapatnya ketika di dalam diskusi. Untuk selanjutnya dengan penggunaan belajar kelompok kecil tercipta partisipasi aktif peserta didik dan kolaborasinya dengan sesama teman dalam kelompok karena saling membutuhkan untuk memecahkan suatu masalah.

Untuk itu dapat disimpulkan bahwa dalam upaya guru PPKn mengembangkan *civic skills* peserta didik dengan indikator keterampilan intelektualnya sudah cukup baik dan berperan dengan cukup baik. Lalu dengan indikator keterampilan partisipasinya juga sudah cukup baik dan berperan cukup baik. Kompetensi yang dimiliki guru PPKn di MTs Al – Ikhlas Tanjung Bintang menjadikan dasar guru PPKn dalam mengupayakan dalam pengembangan potensi atau pun keterampilan kewarganegaraan peserta didik.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Branson, Margaret Stimmann. 1998. *The Role Of Civic Education A Forthcoming Education Policy Task Force Position Paper from the Communitarian Network*. Washington, DC: The George Washington University.
- Budimansyah, Dasim. 2006. Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Berbasis Portofolio. *Jurnal Civics*. Vol 03. No 01.
- Iswadi, Hazrul. 2016. *Sekelumit Dari Hasil PISA 2015 Yang Baru Di Rilis*. Surabaya. Diakses pada 2 November 2018, pukul 09:30 WIB.  
[http://www.ubaya.ac.id/2014/content/articles\\_detail/230/Sekelumit-dari-Hasil-PISA-2015-yang-Baru-Dirilis.html](http://www.ubaya.ac.id/2014/content/articles_detail/230/Sekelumit-dari-Hasil-PISA-2015-yang-Baru-Dirilis.html)
- Komalasari, Kokom. 2011. Kontribusi Pembelajaran Kontekstual untuk Pengembangan Kompetensi Kewarganegaraan Peserta Didik SMP di Jabar. *Jurnal Mimbar*. Vol 27. No 01.
- Murdiono, Mukhamad. 2012. *Strategi Pembelajaran Kewarganegaraan Berbasis Portofolio*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Musfah, Jejen. 2011. *Peningkatan Kompetensi Guru*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Sudarsana, I Ketut. 2015. Peningkatan Mutu Pendidikan Luar Sekolah Dalam Upaya Pembangunan Sumber Daya Manusia. *Jurnal Penjaminan Mutu*. Vol 02. No 02.
- Suryani, Nunuk. dan Leo Agung. 2012. *Strategi Belajar Mengajar*. Yogyakarta: Ombak.
- Ubaedillah, Abdul Rozak. 2012. *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Zubaidah, Siti. 2016. Keterampilan Abad ke-21: Keterampilan Yang Diajarkan Melalui Pembelajaran. *Researchgate*. Vol 03. No 01.